

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Di setiap daerah di Indonesia diberikan suatu otonomi daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara baik. Prinsip otonomi daerah yang diterapkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 adalah menggunakan otonomi seluas-luasnya. Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur semua urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pulak prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk mempercepat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan perjuangan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan ketahanan nasional yang mantap dan usaha pembangunan yang kontinyu dan menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) No. 25/2000 Bab IX tentang Program Pembangunan Daerah dan bentuk Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 November 2000 di Jakarta. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, mempercepat industrialisasi pedesaan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan, tercapainya lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, menguatnya pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatnya kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat pedesaan.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah desa

dalam melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas: a) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa b) Unsur pembantu kepala desa, yaitu Sekretariat desa, unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, seorang kepala desa bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Setiap program yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk desa tersebut akan dibantu oleh aparatur desa. Kepala desa sebagai administrator pembangunan, administrator pemerintah, dan administrasi kemasyarakatan desa harus mengadakan koordinasi dan kontrol atas segala kegiatan di desa.

Desa sungai tonang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan kampar utara, kabupaten kampar. Dengan luas wilayah 10.250.000 m<sup>2</sup>. Total penduduknya berjumlah 1.859 jiwa dengan total KK sebanyak 389 KK. Mata pencaharian penduduk di desa sungai tonang meliputi wiraswasta, swasta, PNS, Petani, Buruh, Nelayan, dan sebagian besar tidak bekerja atau pengangguran. Berikut tabel tentang pekerjaan penduduk di desa sungai tonang kec. kampar utara kab. kampar:

**Tabel 1.1. Distribusi Frekuensi Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar 2014**

NO	KRITERIA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Wiraswasta	299 jiwa	16,1%
2	Swasta	86 jiwa	4,6%
3	PNS	49 jiwa	2,6%
4	Petani	130 jiwa	7,0%
5	Buruh	14 jiwa	0,8%
6	Nelayan	2 jiwa	0,1%
7	Pelajar/Mahasiswa	630 jiwa	33,9%
8	Tidak Bekerja	649 jiwa	34,9%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.859 jiwa</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sungai Tonang 2014*

Jika berpedoman dari tabel di atas, tingkat kesejahteraan penduduk di desa sungai tonang masih sangatlah rendah, dimana penduduk di desa sungai tonang tidak bekerja yaitu 649 jiwa (34,9%). Ini juga berarti tingkat pengangguran di desa sungai tonang masih tinggi. Maka dari itu, pemerintah daerah kabupaten kampar melalui dinas perkebunan membuat suatu program untuk mengatasi hal tersebut. Program itu adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu salah satunya perluasan kebun karet dengan diberikannya bantuan bibit unggul karet oleh pemerintah daerah yaitu dari dinas perkebunan untuk masyarakat-masyarakat yang dinilai kurang mampu dan memiliki tanah garapan akan tetapi tidak memiliki modal untuk membeli bibit atau untuk menggarap tanah tersebut.

Program ini dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat yang mempunyai tanah garapan tetapi tidak memiliki modal untuk menggarapnya. Dengan adanya program ini sedikit banyak dapat membantu masyarakat desa. Program ini telah terlaksana bukan hanya di desa sungai tonang saja, akan tetapi setiap desa yang ada di kecamatan Kampar utara juga mendapatkan

bantuan dari pemerintah ini. Tapi dengan syarat pihak desa harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Program ini sudah terlaksana di desa sungai tonang mulai dari tahun 2006 hingga sekarang. Sumber dana program bibit unggul karet ini yaitu berasal dari APBD Tk.II (Kabupaten Kampar). Akan tetapi, untuk bantuan selanjutnya atau tahun 2014 ini sumber dananya berasal dari APBD Tk.I (Provinsi).

Dalam hal pendistribusian, masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak mampu dan memiliki lahan yang bisa untuk digarap bisa mendapatkan bantuan ini dengan terlebih dahulu mendaftarkan nama ke aparat desa dengan menyerahkan foto copy KTP dan foto copy surat kepemilikan tanah, setelah itu masyarakat akan di seleksi mana yang layak menerima bantuan ini. Kemudian akan di bentuk kelompok-kelompok pengelola yang disebut dengan kelompok tani. Kelompok tani ini berjumlah 2 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 35 orang. Jumlah kelompok berdasarkan jumlah bantuan yang tersedia, misalnya pemerintah daerah menyediakan bantuan untuk 70 Ha tanah maka masyarakat akan dibentuk menjadi 2 kelompok dengan masing-masingnya sebanyak 35 orang. Masing-masing masyarakat akan mendapatkan 500 batang bibit per hektarnya. Kemudian pemerintah daerah akan memberikan biaya pembersihan lahan sebesar 2.400.000 Rupiah/Ha, dan juga biaya mengajir dan melobang 1.200.000 Rupiah/Ha.

Pemerintah daerah khususnya Dinas pertanian memberikan kewenangan kepada kepala desa beserta perangkatnya untuk mendistribusikan program bibit unggul ini kepada masyarakat. Maka dari itu kepala desa sangatlah berperan penting dalam pendistribusian bibit unggul ini. Kepala desa hendaklah berkoordinasi dengan aparat desa lainnya dalam

pelaksanaan pendistribusian. Contohnya saja dalam hal mendata penduduk yang layak menerima bantuan bibit unggul karet ini, kepala desa haruslah teliti mana masyarakat yang layak menerima bantuan ini mana yang tidak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam hal pendistribusian bibit unggul karet kepada masyarakat. Masih adanya kecurangan disana-sini. Contohnya saja dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan dari pemerintah ini, hanya masyarakat tertentu saja atau masyarakat yang mempunyai kedekatan dengan aparaturnya desa yang mengetahuinya, seharusnya informasi ini diinformasikan menyeluruh kepada masyarakat. Kemudian dalam mendata masyarakat yang layak mendapatkan bantuan pemerintah daerah ini, masih terdapatnya kecurangan, pihak-pihak yang seharusnya dapat malah tidak dapat, akan tetapi pihak-pihak yang tidak seharusnya dapat malah mendapatkan bibit tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak puas atas kinerja dari aparaturnya desa dalam pendistribusian bibit tersebut.

Berdasarkan uraian dan gejala yang ada maka disini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: *“Peranan Kepala Desa dalam pendistribusian bibit unggul karet kepada masyarakat di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”*

## **1.2. Perumusan Masalah**

Secara singkat telah dijelaskan kondisi yang melatarbelakangi pentingnya peran dari kepala desa dalam pendistribusian program pemerintah tersebut. Melihat gejala permasalahan yang ada di Desa Sungai Tonang yang ditinjau dari Pelaksanaan program pemerintahan tersebut, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Pendistribusian Bibit Unggul Karet Kepada Masyarakat di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?**

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pendistribusian bibit unggul karet kepada masyarakat di desa sungai tonang kecamatan kampar utara
2. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama kepala desa dan aparaturnya dalam melakukan pendistribusian bibit unggul karet kepada masyarakat

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan bagi para aparaturnya dalam pendistribusian bibit unggul karet atau program pemerintah lainnya di desa sungai tonang
2. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi almamater dimana penulis menuntut ilmu
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil judul yang sama

### **1.5.Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan di bahas mengenai teori yang di jadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa data.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan di bahas tentang, sejarah singkat desa sungai tonang

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisa data dari setiap indikator yang ada.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh analisa yang telah dilakukan.